



newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 136, November 2020



Agus Widjojo: Alumni Diharapkan Mempunyai Kompetensi dan Komitmen...	2
Wakil Presiden Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin Apresiasi Tema Seminar Nasional PPRA 60 dan PPRA 61	3
Penutupan PPRA 61 Lemhannas RI	4
Lemhannas RI Selenggarakan Jakarta Geopolitical Forum 2020	5
Gubernur Lemhannas RI Hadiri Silaturahmi Nasional Badan Publik & Rakornas ke-11 Komisi Informasi se-Indonesia 2020	6
Ketua BPK: Entitas Keuangan Negara Dipandang Perlu Memperkuat Pertahanan Tata Keuangan	7
Lemhannas RI Laksanakan Pengambilan Sumpah PNS Secara Daring.....	8
Agus Widjojo: Tugas Pokok TNI adalah Pertahanan Nasional.....	9
Peserta P3DA 11, Terima Ceramah Menteri Koperasi dan UKM	10
Peluang Menjadi Pahlawan Terbuka Bagi Siapapun	11

Lemhannas RI Selenggarakan Jakarta Geopolitical Forum 2020

Agus Widjojo: Alumni Diharapkan Mempunyai Kompetensi dan Komitmen



Gubernur Lemhannas RI memberikan pembulatan materi kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, pada Selasa (13/10), sehari sebelum penutupan.

Dalam pembulatan materi tersebut Agus mengatakan bahwa tujuan pendidikan yang telah diikuti oleh peserta adalah memantapkan kader pimpinan tingkat nasional yang berkarakter negarawan.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa karakter negarawan berbeda dengan karakter politik. Dalam politik praktis, politisi masih membawa misi dari partai masing-masing. Biasanya sikap negarawan muncul jika sudah melampaui masa bakti dan bisa merefleksikan tentang darma bakti ketika berkecimpung dalam politik praktis. "Negarawan tidak berpihak, semua untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Agus.

Tujuan selanjutnya adalah mencetak pimpinan tingkat nasional yang berwawasan kebangsaan, berpikir strategis, dan terampil dalam memecahkan masalah dalam lingkup nasional, regional, dan global. Dalam

mencetak pemimpin tingkat nasional yang terampil dalam memecahkan masalah-masalah strategis, peserta diberikan studi kasus dan dilatih untuk terbiasa memecahkan masalah-masalah strategis yang berciri pada lingkup yang luas dan menampung data kemudian mengintegrasikan semuanya menjadi sebuah kesimpulan.

Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk mampu memberikan saran kepada pemerintah tentang kebijakan pada tingkat strategis berpusat pada nilai-nilai kebangsaan dalam bentuk kebijakan publik. Agus menjelaskan bahwa karena inti Lemhannas RI berada pada nilai-nilai kebangsaan, maka pada tingkat strategis dalam kebijakan yang diberikan berpusat pada nilai-nilai kebangsaan. Hal tersebut sudah berbentuk kebijakan publik. "Pendidikan merumuskan kebijakan publik, yang memikirkan implikasi (pada) bermacam aspek," tutur Agus.

Agus menjelaskan konstruk operasional pendidikan di Lemhannas RI, yaitu peserta dipacu untuk berpikir kritis dan strategis, komprehensif, integral, holistik, dan berpusat pada peserta aktif. "Kita selalu melibatkan



Negarawan tidak berpihak, semua untuk kepentingan bangsa dan negara

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

peserta untuk berpikir, untuk diberikan studi kasus aktual," kata Agus.

Lebih lanjut Agus menegaskan bahwa pendidikan bersifat mengembangkan kapasitas dan kompetensi individu. Semakin baik kemampuan individu, maka kemampuan kerja sama semakin baik. Agus berharap peserta nantinya mempunyai kompetensi pemahaman terhadap 4 Konsensus Dasar Bangsa dan mempunyai komitmen untuk secara konsisten mengamalkan 4 Konsensus Dasar Bangsa dalam kewenangan jabatan masing-masing.

Wakil Presiden Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin Apresiasi Tema Seminar Nasional PPRA 60 dan PPRA 61



Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin saat memberikan pembekalan kepada alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 dan peserta PPRA 61, pada Selasa (13/10) secara daring.

K. H. Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa selama lebih dari 6 bulan, mayoritas negara-negara di dunia dilanda pandemi Covid-19 yang membuat tatanan hidup dan berbagai sektor kehidupan masyarakat mengalami disrupsi dan perubahan yang signifikan. Hal tersebut mengubah kebiasaan hidup lama, cara pandang dan sikap tindak. Namun, K. H. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa bangsa Indonesia mewarisi semangat juang yang tinggi untuk menghadapi dan mengatasi tantangan akibat dampak pandemi Covid-19.

"Optimisme tersebut harus terus kita jaga dan kita gaungkan melalui upaya nyata dan terus kreatif dan inovatif agar masyarakat dan bangsa kita mampu segera pulih dan kembali produktif guna mencapai cita-cita Indonesia maju," ujar K. H. Ma'ruf Amin.

Dalam mewujudkan hal tersebut, K. H. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah secara konsisten melakukan serangkaian kebijakan dalam rangka penanganan dampak pandemi, yakni *re-focusing* dan realokasi anggaran dilakukan untuk penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat termasuk tenaga medis, memastikan perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, serta memberikan berbagai dukungan serta insentif bagi UMKM dan dunia usaha.

"Saya menyampaikan apresiasi atas 2 tema seminar yang diangkat PPRA 60 dan PPRA 61," kata K. H. Ma'ruf Amin. Alumni PPRA 60 mengadakan seminar dengan mengangkat tema "Nasionalisme di tengah Pandemic Covid-19 dalam Menyongsong Indonesia Emas". Sedangkan peserta PPRA 61 mengadakan seminar nasional dengan tema "Revitalisasi BUMN untuk Kesejahteraan Rakyat".

Menurut K. H. Ma'ruf Amin, nasionalisme dan kesejahteraan rakyat merupakan esensi dari tujuan berbangsa dan bernegara yaitu terciptanya bangsa Indonesia yang

bersatu, cerdas, sejahtera, maju, mandiri, adil, dan makmur. Lebih lanjut K. H. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa dalam rangka menyongsong Indonesia emas, maka modal utama yang dibutuhkan adalah SDM yang unggul dan berkualitas serta perbaikan struktur perekonomian atau transformasi ekonomi.

"Saya berharap bahwa selama masa pendidikan di Lemhannas RI, Saudara-Saudara mendapatkan tambahan pengalaman, pengetahuan, serta kedalaman dalam melakukan analisis keadaan, menyusun rekomendasi, maupun pengambilan kebijakan dan keputusan," kata K. H. Ma'ruf Amin.

Lebih lanjut K. H. Ma'ruf Amin berharap berbagai diskusi dan kajian-kajian sesuai tema seminar nasional di atas, dapat diaktualisasikan dalam bentuk program nyata yang mampu mengangkat optimisme dan memperkuat komitmen kebangsaan melalui penyajian alternatif-alternatif solusi yang direkomendasikan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Penutupan PPRA 61 Lemhannas RI



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menutup secara resmi Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, pada Rabu (14/10) di Ruang Dwi Warna Purwa Lemhannas RI dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dalam sambutannya Agus mengatakan bahwa keberadaan para peserta harus mempunyai tujuan dalam mengikuti pendidikan, sekarang setelah usai mengikuti pendidikan dan meninggalkan almamater asta gatra, para alumni kembali kepada tujuan yang lebih besar yakni sebuah kesadaran setiap alumni memiliki peran dan tanggung jawab.

Agus mengakui bahwa proses belajar PPRA 61 berbeda dengan proses belajar tahun sebelumnya. Hal tersebut karena adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan proses kegiatan belajar mengajar jarak jauh secara dalam jaringan (daring), namun hal tersebut tidak mengurangi kualitas pendidikan yang diberikan oleh lembaga. "Saya menyampaikan

apresiasi dan rasa bangga kepada para alumni PPRA 61 sekalian yang telah menunjukkan dedikasi, kesabaran, kesungguhan, ketekunan, kekompakan, dan komitmennya selama pendidikan berlangsung hingga berakhirnya rangkaian pendidikan pada pagi hari ini," ujar Agus.

Sebagai puncak kegiatan, alumni PPRA 61 telah menyumbangkan pemikirannya melalui seminar dengan judul "Revitalisasi BUMN Sektor Energi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat". Melalui seminar tersebut, para alumni PPRA 61 telah merumuskan konsepsi pemikirannya terkait revitalisasi BUMN sektor energi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan hasil seminar tersebut dapat memberikan sumbang saran pemikiran kepada pengambil keputusan dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah.

Dengan bekal pengetahuan yang telah diberikan selama enam bulan, Lemhannas RI menaruh harapan besar kepada seluruh alumni PPRA 61 untuk mampu mengimplementasikan seluruh

ilmu, pengetahuan dan wawasan yang diperoleh selama pendidikan melalui pemahaman dan cara berpikir komprehensif, integral, holistik, dan sistemik. "Bekal ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan sesuai dengan penugasan di lingkungan kerja masing-masing," tutur Agus.

Agus berharap pelajaran dan pengalaman selama mengikuti PPRA 61 dapat dikembangkan alumni di tempat kerja masing-masing. Nilai tambah yang dapat diambil dari keikutsertaan para alumni PPRA 61 adalah adanya kesempatan saling belajar dan berbagi dari kebersamaan yang berasal dari berbagai ragam latar belakang khususnya antar peserta TNI dan Polri, sipil, serta peserta negara sahabat. Sistem nasional yang efektif hanya dapat dibangun atas dasar kebersamaan dan sinergi antarsektor serta fungsi, kekuatan, dan karakteristik struktur yaitu disiplin secara individu dan kelembagaan.

Lemhannas RI Selenggarakan Jakarta Geopolitical Forum 2020



Lemhannas RI kembali mengadakan acara Jakarta Geopolitical Forum (JGF) Tahun 2020 untuk keempat kalinya dengan mengangkat tema “Geopolitical Landscape In The Covid-19 Era” di MNC Conference Hall, Inews Tower, Jakarta pada Rabu dan Kamis, 21-22 Oktober 2020 yang dilaksanakan secara virtual dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo. Dalam sambutan pembukaannya, Agus mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah merubah seluruh sistem di dunia, seperti pada bidang ekonomi dan kehidupan sosial.

Namun, Agus mengatakan bahwa dampak negatif dari adanya COVID-19 hanyalah satu sisi mata uang. Di sisi lain, dalam konteks hubungan internasional dan geopolitik, pandemi ini menunjukkan sikap negara-negara di dunia terutama negara-negara besar. Di tengah penyebaran COVID-19 yang sangat cepat, negara-negara besar terus berusaha menyebarkan dan memperkuat pengaruh mereka di setiap

penjuru dunia, tidak hanya di bidang ekonomi, namun juga politik dan militer.

Maka dari itu, memperkuat ketahanan nasional menjadi prasyarat utama untuk beradaptasi di tengah pandemi. “Memperkuat Ketahanan nasional menjadi prasyarat utama untuk beradaptasi di tengah pandemi sebelum kita dapat mengurangi dampak buruk dari pandemi ini,” jelas Agus

Acara pembukaan tersebut kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Lestari Priansari Marsudi, S.H., LL.M. serta Wakil Presiden Republik Indonesia 2009-2014 Prof. Dr. Boediono secara virtual. Turut hadir di lokasi, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Pati Djalal.

Pada sesi satu dengan tema “Strategic Implications of Covid-19 to Geopolitic” yang dimoderatori oleh Duta Besar Imron Cotan, hadir sebagai pembicara yaitu Menteri Perdagangan 2011-2014 Gita Wirjawan, Vice President of Janes Group Ltd Harry Kemsley, OBE, dan Janes Senior Analyst for Asia Pacific Military Capabilities

Rukmani Gupta. Pada sesi pertama terdapat beberapa penanggap, yaitu Senior Expert Scowcroft Center for Strategy and Security Atlantic Council Tate Nurkin dan Sean Corbett dari Royal Air Force.

Kemudian pada sesi kedua dengan tema “Policy Implications of COVID-19 in the Context of National Resilience” yang dimoderatori oleh Duta Besar Makarim Wibisono, hadir sebagai pembicara, yaitu Janes Senior Analyst for Asia Pacific Military Capabilities Mark Wilson dan Security Analyst London School of Economics Judith Jacob. Pada sesi kedua terdapat dua penanggap, yaitu Penulis Anthony Davis dan Taprof Bid. SKA Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA.

Pada hari kedua, hadir sebagai pembicara Taprof Lemhannas RI Bid. Strategi dan Hubungan Internasional Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting Dimas Oky Nugroho, dan Direktur Institute for Development of Economics and Finance Dr. Enny Sri Hartati.

Gubernur Lemhannas RI Hadiri Silaturahmi Nasional Badan Publik & Rakornas ke-11 Komisi Informasi se-Indonesia 2020



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menghadiri Silaturahmi Nasional Badan Publik & Rapat Koordinasi Nasional ke-11 Komisi Informasi (KI) se-Indonesia 2020 dengan tema “Inovasi Pelayanan Informasi Publik untuk Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi Nasional melalui Adaptasi Kebiasaan Baru” pada Senin (26/10) secara daring.

Tema yang diangkat dalam acara tersebut adalah sebagai langkah menyikapi permasalahan global, yakni pandemi Covid-19 sehingga KI Pusat merasa perlu membangun sinergi dan integrasi keterbukaan informasi publik pada kesehatan dan ekonomi nasional. Proyeksinya, KI Pusat ingin mengajak berbagai komponen bangsa, terutama badan publik dari pusat hingga daerah dan masyarakat untuk terus melakukan inovasi terhadap pelayanan informasi publik. Tujuan hal tersebut adalah agar pandemi ini tidak menjadi hambatan

bagi ruang *Access to Information* sebagai *Right to Information* pada semua lapisan masyarakat dan menjadi *warning system* bagi Badan Publik untuk tetap melaksanakan *Obligation to Tell* kepada masyarakat secara aktif maupun pasif.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyampaikan tiga hal yang menjadi fokus pada kegiatan tersebut, yang pertama melakukan koordinasi secara nasional untuk sinergi dan integrasi inovasi pelayanan Informasi Publik untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui adaptasi kebiasaan baru. Kedua, membahas dan mendiskusikan rencana aksi terkait sinergi dan integrasi inovasi pelayanan Informasi Publik untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui adaptasi kebiasaan baru.

Terakhir yang ketiga adalah merumuskan langkah-langkah strategis

yang harus diambil oleh badan publik dan Komisi informasi Pusat serta Daerah dalam rangka inovasi pelayanan informasi publik untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui adaptasi kebiasaan baru. “Tantangan yang kita fokuskan harus kita jawab dengan kinerja nyata dan terukur,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informasi RI Jhonny G Plate dan diikuti oleh hampir 1000 Badan Publik yang terdiri atas Komisi Informasi Pusat, 34 Komisi Informasi Provinsi, 5 Komisi Informasi Kabupaten/Kota, 34 Kementerian, 34 Pemerintah Provinsi, 34 Lembaga Non Struktural, 45 Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 85 Perguruan Tinggi Negeri, 9 Partai Politik, 107 Badan Usaha Milik Negara, 550 Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 33 Pegiat dan/atau Praktisi Keterbukaan Informasi.

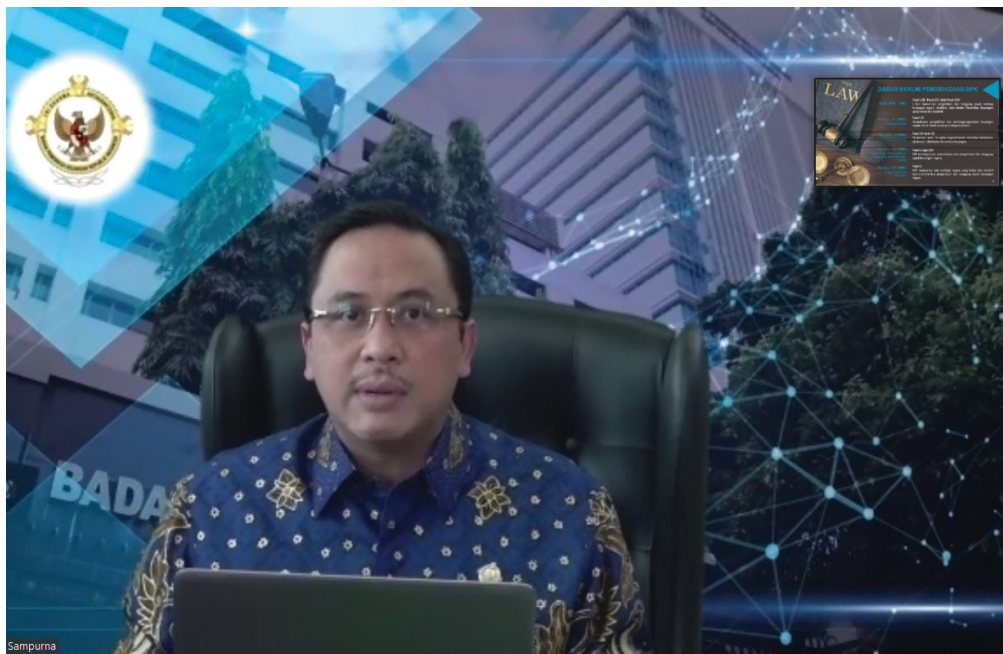
Ketua BPK: Entitas Keuangan Negara Dipandang Perlu Memperkuat Pertahanan Tata Keuangan



Entitas keuangan negara pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya, dipandang perlu memperkuat pertahanan tata keuangan

Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., CSFA

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)



Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., CSFA saat memberikan ceramah kepada peserta Program Pemanjangan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 11 pada Selasa (3/11) secara daring.

Pada kesempatan tersebut Agung memberikan ceramah dengan mengangkat topik "Memperkuat Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Anggaran Pemerintah Daerah dalam Rangka Membangun *Good Governance and Clean Government*".

Dalam ceramahnya, Agung menyampaikan bahwa krisis yang disebabkan pandemi menjadi tantangan yang luar biasa bagi Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 merupakan tantangan yang berawal dari masalah kesehatan, kemudian dampak pandemi meluas ke masalah sosial, ekonomi, dan bahkan sektor keuangan. "Kita harus optimis Indonesia dapat melewati masa krisis akibat pandemi Covid-19 dan kembali bangkit menjadi negara yang maju," ujar Agung.

Menurut Agung, era globalisasi adalah era di mana dunia bertumbuh sangat cepat dan bergerak dengan sangat dinamis. Dalam menghadapi

era globalisasi, BPK sebagai lembaga dengan wewenang konstitusional pemeriksa eksternal turut berpartisipasi aktif di berbagai organisasi internasional, salah satunya adalah International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).

Sebagai salah satu anggota INTOSAI, BPK turut serta menerapkan prinsip tersebut melalui fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa tertinggi di Indonesia. BPK telah menerapkan prinsip ISSAI No. 12 dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020. BPK mengembangkan 3 jenis ulasan sebagai tambahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP). Tiga jenis ulasan itu adalah ulasan atas transparansi fiskal, ulasan kesinambungan fiskal, dan ulasan atas desentralisasi fiskal yang disebut ulasan atas kemandirian fiskal daerah.

"Entitas keuangan negara pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya, dipandang perlu memperkuat pertahanan tata keuangan," tutur Agung. Konsep pertahanan tata kelola tersebut akhirnya disebut

sebagai Tiga Lini Pertahanan. Tiga Lini Pertahanan merupakan sebuah model pertahanan internal organisasi yang menyediakan cara yang sederhana dan efektif untuk meningkatkan pengelolaan dan pengendalian risiko dengan mengklarifikasi dan mengkoordinasikan peran dan tugas penting pada masing-masing lini dalam sebuah organisasi atau entitas.

Lebih lanjut Agung menjelaskan tiap-tiap lini. Lini Pertama diisi dengan fungsi manajemen operasional, yaitu pemilik dan pengelola risiko memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk menilai, mengendalikan, dan memitigasi risiko. Selanjutnya Lini Kedua diisi oleh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Kemudian Lini Ketiga diisi oleh fungsi internal auditor yang berperan memberikan jaminan independen kepada manajemen senior tentang efektivitas pelaksanaan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal termasuk di dalamnya bagaimana lini pertahanan lapis pertama dan kedua bertindak beroperasi untuk mencapai tujuan manajemen dan pengendalian insitusi.

Lemhannas RI Laksanakan Pengambilan Sumpah PNS Secara Daring



Sebanyak 156 orang mengikuti pengambilan sumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) pada Selasa (3/11). Pengambilan sumpah tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan secara daring, hal tersebut merupakan upaya physical distancing dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19.

"Saudara merupakan calon pengawak organisasi di masa depan, maka dari sekarang harus memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan diri," kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo saat memberikan sambutan.

Agus menyampaikan bahwa pengambilan sumpah tersebut diambil dengan kesadaran tanpa paksaan atas kesanggupan para PNS terhadap negara dan Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintah.

"Hendaknya saudara sadar bahwa harus menunjukkan komitmen dan tanggung jawab moral sebagai PNS," ujar



Jadilah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta, perekat dan pemersatu bangsa. Junjung setinggi-tingginya profesi PNS dengan mengedepankan profesionalisme

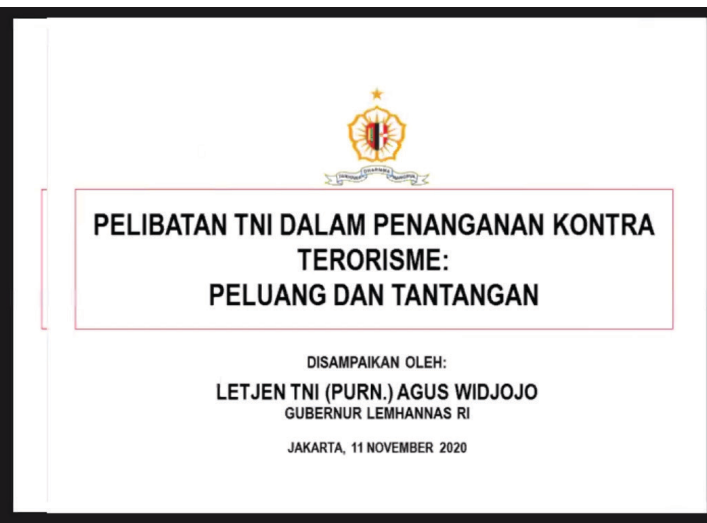
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Agus. Tidak lupa Agus juga mengimbau seluruh PNS yang mengambil sumpah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan proporsional.

Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa diterbitkannya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi. Hal tersebut menjadi tantangan bagi ASN khususnya PNS untuk dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas sebagai pelayan publik. Tentunya hal tersebut merupakan upaya mendukung tujuan reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang efektif, efisien, serta melayani. "Saudara harus mampu menunjukkan figur PNS yang berkualitas dan profesional serta membangun dan menjaga citra positif sebagai ASN," tutur Agus.

"Jadilah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta, perekat dan pemersatu bangsa. Junjung setinggi-tingginya profesi PNS dengan mengedepankan profesionalisme," tegas Agus.

Agus Widjojo: Tugas Pokok TNI adalah Pertahanan Nasional



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo memberikan ceramah di Universitas Andalas mengenai Pelibatan TNI Dalam penanganan Kontra Terorisme Pada Selasa (10/11).

Dalam UU TNI diatur bahwa tugas TNI adalah menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah nasional. Kedaulatan negara terancam apabila terdapat kekuatan militer dari luar yang bersifat memaksa. Demikian juga keutuhan wilayah nasional yang bisa terganggu karena adanya kekuatan dari luar yang bersifat memaksa. Dengan kata lain, lanjut Agus, tugas pokok TNI adalah untuk menghadapi ancaman dari luar. "Kalau kita bicara TNI, TNI itu tugas pokoknya adalah pertahanan nasional," kata Agus.

Di sisi lain, segala gangguan yang muncul dari dalam hakikatnya adalah pelanggaran hukum. Oleh karena itu, respon pertama yang diutamakan adalah respon penegakan hukum juga dapat melalui respon institusi fungsional yang diatur oleh UU.

Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa ada tiga cara dalam pengerahan TNI. Pertama, dalam fungsi organik konstitusional pertahanan nasional. Kedua, dalam sifat perbantuan TNI kepada otoritas sipil dimasa damai. Ketiga, sebagai konsekuensi perubahan status kedaruratan ketika terjadi

pemerintah darurat militer. Cara lainnya dalam pengerahan TNI adalah melalui keputusan politik, yakni memberikan perluasan kewenangan secara terbatas kepada TNI baik membantu aparat penegak hukum atau membantu institusi profesional dalam rangka ketahanan.

Dalam kesempatan tersebut Agus menyampaikan bahwa sebaiknya fungsi pemberantasan tindak pidana terorisme bergantung kepada wilayah kewenangan instansi yang menangani. Apabila terjadi di dalam negeri maka menjadi tanggung jawab fungsi penegakan hukum oleh

instansi penegak hukum, dalam hal ini adalah Polisi. TNI dapat memasuki wilayah kewenangan penegak hukum dalam negeri berdasarkan ketentuan pengerahan dan kewenangan TNI. Di sisi lain, jika terjadi di luar wilayah yuridiksi sistem hukum nasional maka menjadi tugas dan kewenangan TNI dalam menangani pemberantasan tindak pidana terorisme. "Intinya adalah konsisten dengan *criminal justice system* untuk dalam negeri, sedangkan TNI punya peran dan kewenangan untuk memberantas terorisme yang terjadi di luar negeri," kata Agus.



KETENTUAN KONSTITUSIONAL PENERGAHAN TNI

PRINSIP PENEMPATAN TNI SESUAI DENGAN UUD 1945 DALAM KONTEKS TNI PROFESIONAL DALAM DEMOKRASI:

- PENERGAHAN (PENGUNAAN) TNI HANYA BERDASARKAN PERINTAH PRESIDEN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- PERINTAH PRESIDEN MELALUI PERNYATAAN POLITIK YANG TERBUKA UNTUK KONTROL DPR DAN PUBLIK.
- TIDAK ADA TUGAS TNI YANG DILAKSANAKAN SECARA OTOMATIS.
- PANGLIMA TNI TIDAK BISA MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK TENTANG APA YANG HARUS DIPERBUAT TNI SEBAGAI AWAL PENUGASAN. PANGLIMA TNI MENENTUKAN BAGAIMANA (CARA) MELAKSANAKAN TUGAS.

Peserta P3DA 11, Terima Ceramah Menteri Koperasi dan UKM



dalam pemulihan ekonomi nasional, UMKM mendapatkan prioritas. "Dampak Covid-19 terhadap UMKM memang cukup dalam," tutur Teten.

Selanjutnya Teten menjelaskan bahwa Kemenkop UKM memiliki 2 program besar untuk memulihkan UMKM. Pertama adalah restrukturisasi atau relaksasi pinjaman selama 6 bulan dan fungsi di bunga 6% untuk UMKM yang dinilai bankable. Sedangkan untuk UMKM yang masih unbankable diberikan bantuan lewat hibah modal kerja lewat Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro sejumlah Rp2.400.000 per pelaku usaha mikro.

Selain memberikan bantuan pada sisi pendanaan, Kemenkop juga membantu dari sisi permintaan dengan beberapa program seperti Pelibatan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Pasar Digital UMKM, Pengembangan Koperasi Pangan, Belanja di Warung Tetangga, serta mengadakan Pendampingan dan Pelatihan. Pemerintah juga mengalokasikan dana sebanyak Rp321 Triliun yang diprioritaskan untuk belanja produk UMKM.

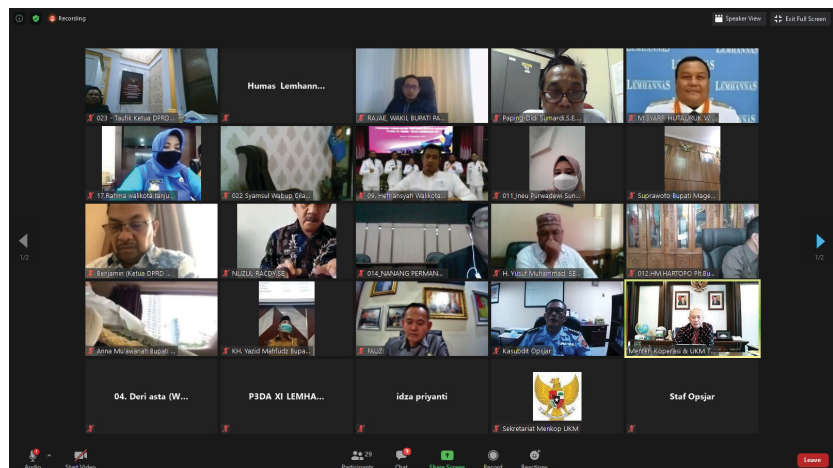
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Drs. Teten Masduki memberikan ceramah kepada Peserta Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 11 pada Kamis (12/11).

Dalam ceramah tersebut, Teten melihat bahwa pelaku usaha di Indonesia 99% adalah UMKM. Lebih lanjut Teten menyampaikan bahwa persentase tersebut secara statistik berada di angka 64.000.000.

Total Kontribusi PDB dari UMKM mencapai 57% dengan Kontribusi Tenaga Kerja yang diserap mencapai 97%. Jika dilihat dari angka-angka tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, yang pertama harus dipulihkan adalah UMKM. Hal tersebut dikarenakan pemulihan UMKM akan berdampak langsung kepada 97% tenaga kerja kita diserap di UMKM, setidaknya dapat mengurangi angka pengangguran dan

sebagai upaya agar angka kemiskinan tidak terlalu tajam. "Paling tidak kalau kita bisa memulihkan UMKM, UMKM bisa menjadi penyangga ekonomi nasional," ujar Teten.

Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM di Indonesia sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Teten menegaskan bahwa untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional harus memulihkan UMKM. Oleh karena itu,



Peluang Menjadi Pahlawan Terbuka Bagi Siapapun



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjono membuka Webinar Refleksi Hari Pahlawan yang diselenggarakan oleh Alumni Taplai Angkatan II Tahun 2020, pada Jumat (13/11) secara daring.

Dalam sambutannya, Agus mengatakan bahwa tidak ada pahlawan yang direncanakan. Menurut Agus, istilah pahlawan mengandung makna yang abstrak.

Sambung Agus, gelar pahlawan diberikan setelah darma bakti konkret seseorang yang melebihi panggilan tugas dan menunjukan karakter yang kuat untuk kepentingan umum. Pahlawan di masa lalu dan di masa kini dirasa sangat berbeda. Pahlawan di masa lalu berfokus fokus pada aspek fisik sesuai dengan situasi pada masa itu.

Dalam konteks era global, peluang untuk menjadi pahlawan terbuka bagi siapapun dengan bercermin dan mengambil pelajaran serta intisari dari sikap kepahlawanan yang sudah ditunjukkan oleh para pahlawan bangsa dengan membuktikan mampu menjadikan negara Indonesia merdeka dan membentuk negara berdasarkan Pancasila.

Agus menegaskan sebuah bangsa dapat menjadi pemenang dalam era globalisasi ketika berhasil membangun daya saing. Upaya membangun daya saing tersebut harus diawali dengan evaluasi mengenai kekurangan dan sisi lemah yang harus diperbaiki serta membina sisi kuat yang dimiliki agar lebih efektif sehingga dapat digunakan untuk membangun kerja sama dan perdamaian antarbangsa di dunia.

Dengan demikian era globalisasi membuka peluang bagi setiap warga untuk dapat memberikan darma bakti yang efektif bagi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi. Bahkan hal tersebut dapat menunjukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila valid untuk dijadikan dasar bagi pembangunan masyarakat global yang terdiri dari elemen-elemen antarbangsa dengan karakteristik kebhinekaan.

Tidak lupa Agus juga menyampaikan bahwa gelar pahlawan akan diberikan oleh publik dan oleh sejarah kepada yang pantas menyandangnya. "Janganlah bekerja bertujuan untuk jadi pahlawan, bekerjalah dengan sepenuh hati, sebaik-baiknya untuk memberikan darma bakti dengan memenuhi panggilan tugas," kata Agus.



Era globalisasi membuka peluang bagi setiap warga untuk dapat memberikan darma bakti yang efektif bagi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi

Letjen TNI (Purn) Agus Widjono
Gubernur Lemhannas RI



Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI

Penanggung Jawab: **Sugeng Santoso** Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto**

Pembuat Artikel: **Naomi Augustina** Penerjemah: **Magista Dian Fitrilia**

Desain Grafis: **Arini Maulidia** Fotografer: **Suryadi**

Sekretariat: **Irina Sri Ekowati, C. Hildamona Permatasari, Mardiana Prihatini,**

Gatot, Yatik Wulandari, Yusnadi

Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <https://www.lemhannas.go.id>